

The Shift From Financial Reporting Towards Sustainability Reporting In Indonesia: Accounting Responses to ESG Regulations

Ariyanti Pora¹, Sumiyarti Umasugi², Afni Rahman³, Wa ode Rahmalia⁴, Marannu Paledung⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: kilikilierika14@gmail.com¹, apriyantipora@gmail.com², umasugisumiyarti@gmail.com³,
afnirahman980@gmail.com⁴, syahreinalvito05@gmail.com⁵, indryastry@gmail.com⁶,
waoderahmalia@gmail.com⁷

Article History:

Received: 30 Juni 2026

Revised: 20 September 2026

Accepted: 05 Oktober 2026

Keywords: *Sustainability Reporting, ESG, Green Accounting, OJK Regulations, Management Accounting.*

Abstrak: Penelitian ini membahas perubahan pelaporan akuntansi di Indonesia dari pelaporan keuangan konvensional menuju pelaporan keberlanjutan yang dipengaruhi oleh regulasi ESG. Fokus kajian ini adalah respons akuntansi terhadap kewajiban pelaporan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan POJK No. 16/POJK.04/2021. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan keberlanjutan semakin meningkat, integrasi ESG ke dalam sistem pengambilan keputusan internal masih terbatas. Oleh karena itu, pola peran ESG perlu diintegrasikan dengan akuntansi hijau agar informasi keberlanjutan tidak hanya menjadi pemenuhan regulasi, tetapi juga mendukung penciptaan nilai jangka panjang. Penelitian ini mengusulkan kerangka integratif yang mencakup pengukuran dampak lingkungan, integrasi informasi ESG ke akuntansi manajemen, dan pengambilan keputusan strategis berbasis keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas operasionalnya. Dalam konteks ini, pelaporan keberlanjutan menjadi semakin penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Di Indonesia, perubahan tersebut semakin kuat setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan regulasi yang mendorong penerapan keuangan berkelanjutan dan pengungkapan aspek ESG dalam pelaporan perusahaan.

POJK No. 51/POJK.03/2017 menjadi landasan utama bagi penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia karena mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan. Selanjutnya, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 memperjelas pengungkapan yang perlu disajikan dalam laporan tahunan perusahaan publik, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Regulasi ini menunjukkan bahwa akuntansi tidak lagi dipahami hanya sebagai alat pelaporan finansial, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas

keberlanjutan.

Walaupun demikian, banyak perusahaan masih memandang pelaporan keberlanjutan sebagai kewajiban formal semata. Informasi ESG kerap disajikan untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi manajemen dan pengambilan keputusan internal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan eksternal dan pemanfaatan strategis informasi keberlanjutan.

Di sisi lain, akuntansi hijau menawarkan pendekatan yang lebih operasional karena mampu mengukur biaya dan dampak lingkungan dalam bentuk finansial. Dengan demikian, akuntansi hijau dapat menjadi

jembatan antara pelaporan ESG dan pengambilan keputusan manajerial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji respons akuntansi terhadap regulasi ESG di Indonesia serta merumuskan kerangka integratif yang menghubungkan pelaporan keberlanjutan dengan akuntansi hijau.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur konseptual. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah membangun pemahaman teoretis mengenai respons akuntansi terhadap regulasi ESG serta merumuskan kerangka integratif yang relevan bagi konteks Indonesia. Dengan pendekatan ini, pembahasan difokuskan pada sintesis konsep, regulasi, dan penelitian terdahulu.

Jenis dan Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang berasal dari:

- Regulasi OJK terkait keuangan berkelanjutan dan pelaporan perusahaan.
- Standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI, SASB, dan IFRS S1/S2.
- Literatur ilmiah mengenai ESG, sustainability reporting, dan akuntansi hijau.
- Buku dan sumber akademik yang relevan dengan akuntansi keberlanjutan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan regulasi, dan penelaahan hasil penelitian terdahulu. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik ESG, pelaporan keberlanjutan, dan akuntansi hijau. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran konseptual yang utuh mengenai perkembangan isu yang dibahas.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif dan tematik. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan konsep-konsep utama, membandingkan peran pelaporan keuangan dan pelaporan keberlanjutan, serta mengidentifikasi ruang integrasi antara ESG reporting dan akuntansi hijau. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kerangka integratif yang diusulkan dalam artikel ini.

Fokus Analisis

Fokus analisis dalam artikel ini mencakup:

1. Respons akuntansi terhadap regulasi ESG.
2. Kesenjangan antara kepatuhan pelaporan dan integrasi strategis.
3. Peran akuntansi hijau sebagai penghubung antara pelaporan eksternal dan pengambilan keputusan internal.
4. keputusan internal.
5. Pengembangan kerangka integratif ESG dan akuntansi hijau.

Keterbatasan Metode

Karena artikel ini bersifat konseptual, pembahasan belum didukung oleh pengujian empiris langsung. Oleh karena itu, kerangka yang dihasilkan masih memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan di masa mendatang. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap relevan untuk membangun dasar teoretis yang kuat sebelum dilakukan pengujian empiris.

Desain

Studi literatur sistematis mencakup:

1. Analisis regulasi POJK 51/2017 & 16/2021
2. Analisis literatur ESG & green accounting
3. Analisis studi kasus ESG di Indonesia
4. Pengembangan kerangka ESG + green accountin
- 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons akuntansi terhadap regulasi ESG

Regulasi ESG di Indonesia mendorong perubahan penting dalam praktik akuntansi perusahaan publik. Kehadiran POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 menandai bahwa pelaporan keberlanjutan bukan lagi isu tambahan, melainkan bagian dari akuntabilitas korporat yang harus diperhatikan secara serius. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga untuk menyampaikan bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Respons perusahaan terhadap regulasi ini umumnya terlihat melalui penyusunan laporan keberlanjutan dan pengungkapan aspek ESG dalam laporan tahunan. Namun, pada banyak kasus, respons tersebut masih berorientasi pada kepatuhan formal. Artinya, perusahaan menyusun laporan karena diwajibkan oleh regulasi, bukan karena ESG sudah terintegrasi penuh dalam sistem pengambilan keputusan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan ESG memang telah berkembang, tetapi kualitas pemanfaatannya masih belum optimal.

Kesenjangan antara Kepatuhan dan Integrasi Strategis

Salah satu temuan penting dalam pembahasan ini adalah adanya kesenjangan antara kepatuhan pelaporan dan integrasi strategis ESG. Banyak perusahaan sudah mampu memenuhi kewajiban pelaporan keberlanjutan, tetapi belum menjadikan informasi tersebut sebagai dasar untuk budgeting, costing, evaluasi kinerja, maupun keputusan investasi. Dengan kata lain, informasi ESG masih berhenti pada level pelaporan eksternal.

Kesenjangan ini terjadi karena pelaporan keberlanjutan sering diposisikan sebagai dokumen administratif. Akibatnya, data ESG yang dikumpulkan tidak selalu diolah kembali menjadi informasi manajerial yang berguna. Padahal, jika informasi tersebut diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi internal, perusahaan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, seperti pengendalian biaya lingkungan, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

Kerangka Integratif ESG dan Akuntansi Hijau

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, artikel ini mengusulkan bahwa ESG reporting dan akuntansi hijau perlu dihubungkan dalam satu kerangka integratif. Kerangka ini dimulai dari

pengukuran dampak lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan integrasi informasi ESG ke sistem akuntansi manajemen, dan akhirnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Pendekatan integratif ini penting karena membantu perusahaan bergerak dari sekadar memenuhi kewajiban pelaporan menuju penciptaan nilai yang lebih nyata. Jika informasi ESG hanya disimpan dalam laporan tahunan, maka manfaatnya akan terbatas. Namun, jika informasi tersebut digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, maka pelaporan keberlanjutan dapat menjadi alat manajemen yang strategis.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pergeseran dari pelaporan keuangan menuju pelaporan keberlanjutan di Indonesia merupakan konsekuensi dari meningkatnya tuntutan atas transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ESG. Regulasi OJK, khususnya POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, telah memberi dasar hukum yang kuat bagi perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan dan mengungkapkan aspek sosial serta lingkungan secara lebih sistematis. Namun, kajian ini juga menunjukkan bahwa pelaporan keberlanjutan di banyak perusahaan masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pengambilan keputusan internal. Oleh karena itu, akuntansi hijau menjadi pendekatan yang relevan untuk menghubungkan informasi ESG dengan keputusan manajerial agar pelaporan keberlanjutan tidak berhenti pada level kepatuhan, tetapi benar-benar menghasilkan nilai jangka panjang bagi perusahaan.

Implikasi

Secara teoritis, artikel ini memperkuat pandangan bahwa akuntansi modern perlu berkembang dari pelaporan finansial menuju pelaporan yang lebih luas dan berorientasi keberlanjutan. Integrasi ESG dan akuntansi hijau menunjukkan bahwa informasi nonfinansial dapat memiliki nilai strategis apabila diolah dengan pendekatan akuntansi yang tepat. Secara praktis, perusahaan dapat menggunakan kerangka integratif ini untuk memperbaiki kualitas pelaporan, mengidentifikasi biaya lingkungan, dan memperkuat pengambilan keputusan internal. Bagi regulator, temuan ini menegaskan pentingnya standarisasi pelaporan dan peningkatan kapasitas implementasi agar laporan keberlanjutan tidak hanya menjadi kewajiban administratif.

Rekomendasi

Perusahaan disarankan mulai mengembangkan sistem akuntansi yang mampu mengidentifikasi dan mengukur biaya lingkungan secara lebih jelas. Selain itu, informasi ESG sebaiknya dihubungkan langsung dengan budgeting, evaluasi kinerja, dan perencanaan strategis agar manfaatnya lebih nyata bagi organisasi. Regulator dapat memperkuat pedoman pelaporan

keberlanjutan agar lebih seragam dan mudah diterapkan oleh perusahaan publik. Sementara itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris pada sektor atau perusahaan tertentu agar kerangka integratif ESG dan akuntansi hijau dapat diuji secara lebih konkret.

Keterbatasan

Artikel ini bersifat konseptual sehingga belum didukung oleh pengujian empiris langsung. Selain itu, pembahasan masih berfokus pada kerangka umum dan belum membandingkan implementasi antara sektor secara rinci. Karena itu, hasil kajian ini masih perlu diperkuat melalui penelitian lapangan di masa mendatang.

REFERENSI

- Adams, C. A. (2020). Integrating sustainability into accounting education and practice. Greenleaf Publishing.
- Eccles, R. G., & Boatright, J. R. (2021). Sustainability and the future of accounting. Routledge.
- Global Reporting Initiative. (2023). GRI standards. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Standar akuntansi keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S1: General requirements for disclosure of sustainability-related financial information. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standardsnavigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- IFRS Foundation. (2023). IFRS S2: Climate-related disclosures. IFRS Foundation.
- Kruger, P. (2024). Accounting for sustainability and climate risk. Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. [https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan](https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan%20Keuangan%20Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuang.aspx)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. [https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan--Emiten%20atauPerusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf)
- Setiatin, T. (2025). Sustainable accounting and environmental, social, and governance (ESG) reporting: